

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN AMIL ZAKAT
DAERAH (BAZDA) KOTA PADANG DALAM PENGENTASAN
KEMISKINAN DI KOTA PADANG
(Studi pada Program Bantuan Dana Usaha Tahun 2008-2009)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh:

**M.LUTHFI MUNZIR A.M BURHANI
05193096**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2009



ABSTRAK

M.Luthfi Munzir A.M Burhani. Skripsi S1. Implementasi Kebijakan Badan Amil Zakat Daerah Kota Padang dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Padang (Studi pada Program Bantuan Dana Usaha Tahun 2008-2009). Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang. 111 halaman, 11 buku, 2 skripsi, 5 makalah, 1 artikel, 3 website.

Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pada semua tingkatan mulai dari nasional hingga ke kecamatan berperan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Salah satu kebijakan BAZDA Kota Padang dalam pengentasan kemiskinan adalah program Bantuan Dana Usaha yang merupakan program dengan memberikan bantuan berupa dana bergulir atau pinjaman untuk masyarakat miskin dalam jangka waktu satu tahun. Program dengan format seperti ini mulai dilakukan pada tahun 2008-2009. Di dalam Program bantuan dana usaha ini BAZDA Kota Padang melibatkan *Baitul Maal wat Tamwiil Rangkang Basamo* sebagai mitra dalam mengimplementasikan program bantuan dana usaha. Setelah satu tahun berjalan, peneliti tertarik untuk melihat implementasi program bantuan dana usaha ini. Sehingga yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Implementasi Kebijakan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Padang dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Padang (Studi pada Program Bantuan Dana Usaha Tahun 2008-2009)?"

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program bantuan dana usaha pada Badan Amil Zakat Daerah Kota Padang dalam pengentasan kemiskinan di Kota Padang, dengan lokasi penelitian di Kecamatan Koto Tengah. Teori yang digunakan adalah Teori Edward III yang ditinjau dari aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik keabsahan data peneliti menggunakan proses triangulasi data. Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling*.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, *pertama*, komunikasi berupa aspek prosedural terhadap persyaratan menjadi penerima bantuan yang belum dilakukan sesuai prosedur. *Kedua*, Aspek sumberdaya (finansial) dalam memberikan bantuan dana usaha masih terbatas karena terbatasnya dana zakat. *Ketiga*, disposisi implementor yang ramah dan demokratis dalam membina masyarakat. Keempat, struktur birokrasi tanpa adanya red-tape seperti yang diungkapkan masyarakat.

Saran dalam penelitian ini adalah, *pertama*, perlunya konsistensi implementor terutama mengenai persyaratan masyarakat menerima bantuan dana usaha. *Kedua*, perlu dilakukan kesinambungan program Bantuan Dana Usaha ini dengan pembinaan yang dilakukan secara komprehensif dan kontinyu

Kata Kunci: Badan Amil Zakat, Zakat, implementasi program dan bantuan dana usaha.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pekerjaan sosial merupakan aktivitas kemanusiaan yang telah memiliki perhatian yang mendalam pada pemberdayaan masyarakat miskin. Prinsip-prinsip pekerjaan sosial seperti, "menolong orang agar mampu menolong dirinya sendiri (*to help people to people themselves*), "penentuan nasib sendiri" (*self determination*), "bekerja dengan masyarakat" (*working with people*) dan bukan "bekerja untuk masyarakat (*working for people*), menunjukkan betapa pekerjaan sosial memiliki komitmen yang kuat terhadap pemberdayaan masyarakat. Betapa pekerjaan sosial merupakan profesi yang populis dan tidak elitis¹.

Terdapat tiga komponen penting dalam pekerjaan sosial yang saling berkorelasi, yaitu: kemiskinan dan/atau kekayaan-sektor informal (sebagai tempat karena terbatasnya kemampuan sektor formal) -peningkatan ekonomi (keluarga, masyarakat, negara)-². Dalam ruang lingkup tersebut, pekerjaan sosial menjadi bermakna bahwa suatu bentuk usaha untuk melakukan pemberdayaan masyarakat agar keluar dari lingkaran kemiskinan yang pada akhirnya meningkatkan taraf hidup masyarakat (dari sebelumnya miskin menjadi tidak miskin). Hal ini mengingat bahwa angka kemiskinan di Indonesia yang masih memprihatinkan,

¹ Edi Suharto. 2006. Makalah, *Pendekatan Pekerjaan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Konsep, Indikator dan Strategi*, dalam www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_30.htm yang disampaikan pada pelatihan pemberdayaan masyarakat miskin bagi tenaga kerja kesejahteraan sosial masyarakat. Di akses terbaru tanggal 14 Juli 2009

² *Ibid*

sehingga dengan demikian diperlukan suatu langkah melalui pekerjaan sosial untuk dapat menekan, bahkan menanggulangi kemiskinan tersebut.

Pada tahun 1970 terdapat 70 juta atau 60 persen penduduk Indonesia yang berada di garis kemiskinan, maka hanya dalam dua dasawarsa jumlah tersebut turun menjadi 27,7 juta atau 15,08 persen. Pada tahun 1993, jumlah penduduk yang masih berada di garis kemiskinan menjadi 25,9 juta atau 13,67 persen. Pada tahun 1996, prosentase penduduk miskin menurun lagi menjadi 11,3 persen. Akan tetapi akibat krisis multidimensi yang menimpa Indonesia, jumlah penduduk miskin pada periode 1996-1998 melonjak kembali hingga menjadi 49,5 juta jiwa (24,2%) atau bertambah sebanyak 27,0 juta jiwa. Pada akhir tahun 1999, International Labour Organization (ILO) memperkirakan jumlah orang miskin mencapai 129,6 juta jiwa atau sekitar 66,3% dari keseluruhan penduduk Indonesia³.

Berdasarkan data dari Departemen Sosial tahun 2002, jumlah penduduk miskin mencapai 35,7 juta jiwa dan 15,6 juta jiwa (43%) diantaranya masuk kategori miskin. Secara keseluruhan, prosentase penduduk miskin dan fakir miskin terhadap total penduduk Indonesia adalah sekitar 17,6 persen dan 7,7 persen. Ini berarti bahwa secara rata-rata jika ada 100 orang Indonesia berkumpul, sebanyak 18 orang diantaranya adalah orang miskin, yang terdiri dari 10 orang bukan fakir miskin dan 8 orang fakir miskin⁴.

³ Edi Suharto, 2006. *Analisis Kebijakan Publik; Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: CV. Alfabeta, halaman 18-19

⁴ *Ibid*

Bab VI

Kesimpulan

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan hasil penelitian yang di dapat di lapangan, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Implementasi program Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Padang dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Padang belum berjalan secara optimal. Dalam pengertian belum sepenuhnya terealisasi dengan baik dan efektif berdasarkan teori Edward III.
2. Program penanggulangan kemiskinan dalam penelitian adalah Bantuan Dana Usaha yang dilakukan oleh BAZDA bekerja sama dengan mitra usahanya, yaitu *Baitul Maal wat Tamwiil* (BMT) Rangkaian Basamo. Dalam konteks ini, *Baitul Maal wat Tamwiil* sebagai pelaksana teknis implementasi program Badan Amil Zakat (BAZDA) Kota Padang. Sementara Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Padang mensahkan hasil survey yang dilakukan oleh *Baitul Maal wat Tamwiil* dan menyetujui penyediaan dana untuk Bantuan Dana Usaha. Program pemberdayaan ini tidak hanya membina masyarakat miskin melalui Bantuan Dana Usaha, tetapi pembinaan rohani juga dilakukan pada setiap pertemuan satu kali sebulan di kantor Kecamatan pada waktu yang telah ditentukan untuk melakukan evaluasi dan melihat kendala yang dihadapi masyarakat

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku Metodologi

- Bungin, Burhan, 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Malcong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin. 2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta Bandung.

Buku & Sumber Utama

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Al-Quran terjemahan, Penerbit Syaamil
- Keputusan Walikota Padang Nomor 165 Tahun 2006 tentang Penetapan Rumah Tangga Miskin Kota Padang Tahun 2006.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Negara*. Bandung: Alfabeta
- Profil Badan Amil Zakat Dacrah (BAZDA) Kota Padang
- Purwanto, Erwan Agus, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Suharto, Edi. 2006. *Analisis Kebijakan Publik; Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- Winarno, Budi. 2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Medpressindo
- Widodo, Joko, 2008. *Analisis Kebijakan Publik; Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing
- Qardawi, Yusuf. 1996, *Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Penerbit Litera Antar Nusa dan Penerbit Mizan.